

Analisis perbandingan kinerja keuangan provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera

Muhammad Hamdan Sayadi

Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia

Abstract

The local governments are expected to be able objectify the local budget, especially the revenue that becomes the main source to objectify the expenditure budget. Local governments can be autonomous if its can maximize their potency, especially the local revenue. This paper aims to analyze the level of regional financial dependence and degree of decentralization in the provinces which is located in the Sumatera island and Java with the comparison of financial performance between the provinces. This paper used the method of quantitative descriptive with the ratio of regional financial dependence and degree of decentralization as the analysis tools. The results indicated that financial performance of provinces in the Java island much better than provinces in the Sumatera island because its had much better the realization of local revenue. The factor that affecting financial performance of provinces in the Java island much better was the good ability to acquire local revenue so that it can make very low level of regional financial dependence to the central government and very good degree of decentralization.

Keywords: Budgeting, Realization, Financial Performance

Abstrak

Pemerintah daerah diharapkan mampu merealisasikan anggaran yang telah disahkan, khususnya pendapatan yang menjadi sumber utama dalam merealisasikan anggaran belanja. Pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri apabila mampu memaksimalkan potensi daerahnya melalui penyerapan PAD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi pada seluruh provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa serta membandingkan kinerja keuangan antar provinsi tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif serta menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan provinsi yang terletak di Pulau Jawa jauh lebih baik dari pada provinsi di Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah memiliki realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jauh lebih baik dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan provinsi di Pulau Jawa jauh lebih baik ialah kemampuan memperoleh PAD yang sangat baik sehingga membuat tingkat ketergantungan keuangan daerah yang sangat rendah pada pemerintah pusat dan tingkat desentralisasi yang sangat baik.

Kata kunci: Anggaran, Realisasi, Kinerja Keuangan

Permalink/DOI : <https://doi.org/10.21067/jem.v16i2.4958>

How to cite : Sayadi, M. H. (2020). Analisis perbandingan kinerja keuangan provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 16(2), 96-104.

Article info : Received: Sept 2020; Revised: Nopember 2020; Accepted: Nopember 2020

Alamat korespondensi*:
Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri
Jl. Jendral Sudirman No.629 Km.4 Palembang 30129, Indonesia
E-mail: hamdansayadi@gmail.com

ISSN 0216-373X (print)
ISSN 2502-4578 (online)

Pendahuluan

Provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia memiliki kewenangan mengelola daerahnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam mengelola keuangan, terutama dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD menuntut setiap pemerintah daerah mampu merealisasikan anggaran yang telah disahkan, khususnya pendapatan yang menjadi sumber utama dalam merealisasikan anggaran belanja. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan komponen pendapatan (Halim & Kusufi, 2014). Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang baik dapat dicapai melalui pengawasan dari pemerintah pusat (Kiswanto & Fatmawati, 2019).

Pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri apabila mampu memaksimalkan potensi daerahnya melalui penyerapan PAD. Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, dimana setiap kenaikan kinerja keuangan kabupaten dan kota disebabkan meningkatnya PAD daerah tersebut (Harjito *et al.*, 2020). Pelaksanaan otonomi daerah dapat dibiayai ketika daerah memiliki kinerja keuangan yang baik (Sulistyo, 2018).

Mahmudi (2019) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat

dianalisis menggunakan analisis pendapatan berupa analisis varians (selisih) anggaran pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, analisis rasio keuangan, dan analisis potensi pendapatan asli daerah. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting dikarenakan bermanfaat bagi kelangsungan pemerintah daerah di masa mendatang, manfaatnya berupa berusaha melampaui kinerja yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan tingkat ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi pada seluruh provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa. Secara rinci, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk membandingkan kinerja keuangan antara provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa karena terdapat perbedaan tingkat kemandirian antara kota yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu.

Beberapa daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang sangat rendah yaitu pemerintah daerah Labuhan Batu, pemerintah provinsi Bangka Belitung, dan kabupaten dan kota di provinsi Aceh. Tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu termasuk dalam kriteria rendah sekali atau memiliki tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang sangat tinggi (Lubis & Nurlia, 2017). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zuhri (2020) menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Bangka Belitung termasuk kriteria sangat tinggi setelah diukur dengan rasio ketergantungan keuangan daerah. Pemerintah kabupaten dan kota di Aceh juga memiliki rasio kemandirian yang sangat rendah atau tingkat ketergantungan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat (Prastiwi *et al.*, 2016).

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh beberapa penelitian. Penelitian Andriani dan Wahid (2018) menunjukkan bahwa pemerintah kota Tasikmalaya memiliki

tingkat kemandirian pada level sedang. Pemerintah kota Tangerang Selatan memiliki tingkat kemandirian pada pola hubungan delegatif yang berarti tingkat kemandiriannya sangat baik dan sangat kecil ketergantungan pada pemerintah pusat (Nufus *et al.*, 2017). Sementara pemerintah DI Yogyakarta memiliki tingkat kemandirian yang rendah (Sulianti & Ika, 2012).

Metode

Penelitian ini tergolong metode deskriptif kuantitatif. Metode ini bertujuan mengumpulkan data, kemudian dengan data tersebut dapat dijelaskan karakteristik situasi atau keadaan tertentu (Sekaran & Bougie, 2017).

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan

Jawa. Sementara pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini, yaitu:

1. Provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa
2. Provinsi yang menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019.

Berdasarkan tabel 1, sampel yang didapat setelah dilakukan pemilihan sampel melalui metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu: provinsi Bangka Belitung, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kepri, Riau, Sumbar, Sumsel, dan Sumut. Penelitian ini akan dianalisis dengan rasio

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No	Provinsi	Terletak dipulau	LRA Tahun 2019
1	Aceh	Sumatera	Belum ada
2	Bengkulu	Sumatera	Belum ada
3	Bangka Belitung	Sumatera	ada
4	Banten	Jawa	ada
5	DI Yogyakarta	Jawa	ada
6	DKI Jakarta	Jawa	ada
7	Jambi	Sumatera	Belum ada
8	Jawa Barat	Jawa	Belum ada
9	Jawa Tengah	Jawa	ada
10	Jawa Timur	Jawa	Belum ada
11	Kepri	Sumatera	ada
12	Riau	Sumatera	ada
13	Sumbar	Sumatera	ada
14	Sumsel	Sumatera	ada
15	Sumut	Sumatera	ada

Sumber: Data Diolah, 2020

ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dihitung dengan membagi jumlah pendapatan transfer terhadap jumlah pendapatan daerah. Sementara kriteria-kriteria yang dipakai untuk mendeskripsikan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Kategori Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan (%)	Kategori
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup Tinggi
40,01 – 50,00	Tinggi
Lebih dari 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Banga (2017)

Derajat desentralisasi dihitung dengan membagi jumlah pendapatan asli daerah

terhadap jumlah pendapatan daerah Mahmudi (2019). Sementara kriteria-kriteria yang dipakai untuk mendeskripsikan derajat desentralisasi dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Kategori Penilaian Derajat Desentralisasi

Ketergantungan (%)	Kategori
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup Baik
40,01 – 50,00	Baik
Lebih dari 50,00	Sangat Baik

Sumber: Banga (2017)

Hasil

Penelitian ini dilakukan pada seluruh provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa dengan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019 menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi.

Tabel 4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (dalam miliar Rupiah)

Provinsi	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Persentase Ketergantungan
	LRA Tahun 2019		
Bangka Belitung	1.767,92	2.694,21	65,62%
Banten	4.166,57	11.201,37	37,20%
DI Yogyakarta	3.608,01	5.699,36	63,31%
DKI Jakarta	14.551,57	62.300,68	23,36%
Jawa Tengah	11.398,77	25.859,73	44,08%
Kepri	2.626,46	3.939,45	66,67%
Riau	5.141,63	8.703,23	59,08%
Sumbar	4.046,88	6.390,34	63,33%
Sumsel	5.765,18	9.282,38	62,11%
Sumut	7.300,65	13.081,48	55,81%

Sumber: Data Diolah, 2020

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Jika rasio ini semakin besar, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat juga semakin besar (Mahmudi, 2019). Kinerja keuangan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah disajikan pada tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat 7 provinsi yang memiliki persentase ketergantungan diatas 50 persen yang artinya tingkat ketergantungan pada level sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Apabila hasil analisis diurutkan berdasarkan tingkat

ketergantungan dari sedang ke sangat tinggi, dapat dilihat pada tabel 5.

Berdasarkan tabel 5, hanya provinsi DKI Jakarta dengan tingkat ketergantungan sedang. Pada tingkat ketergantungan cukup tinggi ditunjukkan oleh provinsi Banten dan tingkat ketergantungan tinggi diisi provinsi Jawa Tengah. Sementara tingkat ketergantungan pada level sangat tinggi terdapat 7 provinsi, yaitu provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Tabel 5. Kelompok Tingkat Ketergantungan Daerah

No	Tingkat Ketergantungan Daerah	Persentase Ketergantungan	Provinsi
1	Sedang	23,36%	DKI Jakarta
2	Cukup Tinggi	37,20%	Banten
3	Tinggi	44,08%	Jawa Tengah
4		55,81%	Sumatera Utara
5		59,08%	Riau
6		62,11%	Sumatera Selatan
7	Sangat Tinggi	63,31%	DI Yogyakarta
8		63,33%	Sumatera Barat
9		65,62%	Bangka Belitung
10		66,67%	Kepulauan Riau

Sumber: Data Diolah, 2020

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa provinsi DKI Jakarta dengan kinerja keuangan terbaik menurut rasio ketergantungan keuangan daerah dengan rasio 23,36%. Kemudian provinsi Banten dengan rasio 37,20% dan Jawa Tengah dengan rasio 44,08%.

Perbandingan kinerja keuangan antara provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan

Jawa sangat signifikan. Pada kategori sedang, cukup tinggi, dan tinggi semua diisi oleh provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Sementara seluruh provinsi yang terletak di Pulau Sumatera memiliki tingkat ketergantungan pada level sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Analisis kinerja keuangan menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah

menunjukkan bahwa kinerja keuangan provinsi yang terletak di Pulau Jawa lebih baik dibandingkan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera.

Derajat Desentralisasi

Mahmudi (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi persentase derajat

desentralisasi maka semakin baik kinerja keuangan suatu daerah. Kinerja keuangan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 menunjukkan bahwa hanya ada 3 provinsi yang memiliki persentase

Tabel 6. Derajat Desentralisasi (dalam miliar Rupiah)

Provinsi	Pendapatan Transfer LRA Tahun 2019	Total Pendapatan Daerah	Persentase Ketergantungan
Bangka Belitung	826,76	2.694,21	30,69%
Banten	7.022,31	11.201,37	62,69%
DI Yogyakarta	2.082,80	5.699,36	36,54%
DKI Jakarta	45.707,40	62.300,68	73,37%
Jawa Tengah	14.437,78	25.859,73	55,83%
Kepri	1.311,70	3.939,45	33,30%
Riau	3.558,21	8.703,23	40,88%
Sumbar	2.328,43	6.390,34	36,44%
Sumsel	3.496,15	9.282,38	37,66%
Sumut	5.763,15	13.081,48	44,06%

Sumber: Data Diolah, 2020

derajat desentralisasi diatas 50 persen yang artinya memiliki kontribusi PAD yang tinggi dibandingkan 7 provinsi lainnya. Apabila hasil analisis diurutkan berdasarkan tingkat ketergantungan dari sedang ke sangat tinggi, disajikan pada tabel 7.

Berdasarkan tabel 7, hanya terdapat 3 provinsi yang memiliki tingkat kemampuan keuangan (tingkat desentralisasi) sangat baik atau diatas 50%. Sementara 7 provinsi lainnya di bawah level atau kategori tersebut. Berdasarkan tabel 7, hanya terdapat 3 provinsi yang memiliki tingkat kemampuan keuangan (tingkat desentralisasi) sangat baik atau diatas 50%. Sementara 7 provinsi lainnya di bawah level atau kategori tersebut.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa provinsi DKI Jakarta dengan kinerja

keuangan terbaik menurut derajat ketergantungan dengan rasio 73,37%. Kemudian provinsi Banten dengan rasio 62,69% dan Jawa Tengah dengan rasio 55,83%.

Tingkat desentralisasi provinsi Bangka Belitung berada dibawah provinsi lainnya dikarenakan realisasi pendapatan pajak daerah yang rendah yaitu sebesar Rp 761 miliar. Sedangkan provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat desentralisasi yang sangat baik dikarenakan mampu merealisasikan pendapatan pajak daerah yang jauh lebih tinggi dari provinsi lainnya yaitu sebesar Rp 40,3 triliun.

Perbandingan kinerja keuangan antara provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa sangat signifikan. Pada

Tabel 7. Kelompok Derajat Desentralisasi

No	Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah	Derajat Desentralisasi (%)	Provinsi
1		73,37%	DKI Jakarta
2	Sangat Baik	62,69%	Banten
3		55,83%	Jawa Tengah
4		44,06%	Sumatera Utara
5	Baik	40,88%	Riau
6		37,66%	Sumatera Selatan
7		36,54%	DI Yogyakarta
8	Cukup Baik	36,44%	Sumatera Barat
9		33,30%	Kepulauan Riau
10		30,69%	Bangka Belitung

Sumber: Data diolah, 2020

kategori tingkat kemampuan keuangan daerah sangat baik semua diisi oleh provinsi yang terletak di Pulau Jawa, sementara seluruh provinsi yang terletak di Pulau Sumatera memiliki tingkat desentralisasi di bawahnya. Analisis kinerja keuangan menggunakan derajat desentralisasi menunjukkan bahwa kinerja keuangan provinsi yang terletak di Pulau Jawa lebih baik dibandingkan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera.

Kinerja keuangan yang baik berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi sangat dipengaruhi oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah yang memiliki tingkat kemampuan keuangan daerah sangat baik, realisasi pendapatan pajak daerah masing-masing sebesar Rp 40,3, 6,7, dan 11,9 triliun pada tahun 2019. Sementara provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka

Belitung yang memiliki tingkat ketergantungan sangat tinggi pada pemerintah pusat, realisasi pendapatan pajak daerah masing-masing sebesar Rp1.9 triliun, 1.2 triliun, dan 761 miliar.

Pembahasan

Analisis kinerja keuangan menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi menunjukkan perbedaan kinerja antara provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa. Kinerja keuangan provinsi yang terletak di pulau jawa secara umum lebih baik dibandingkan dengan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Nufus *et al.* (2017) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan Kota Tangerang Selatan sangat baik.

Sulianti dan Ika (2012) menyatakan peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah provinsi DI Yogyakarta diikuti dengan meningkatnya kinerja keuangan. Kinerja keuangan juga dipengaruhi oleh PAD pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Wahyuni & Ardini, 2018). Tamboto *et al.*

(2014) juga menemukan bahwa peningkatan kinerja keuangan dipengaruhi oleh peningkatan pada PAD. Realisasi PAD yang semakin tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik (Mahmudi, 2019).

Hasil penelitian yang menunjukkan kinerja keuangan provinsi di luar Pulau Jawa memiliki kinerja yang kurang baik sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Mokodompit *et al.* (2014) menyatakan bahwa tingkat desentralisasi kota Kotamobagu sangat rendah yang berarti memiliki ketergantungan sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Penelitian Mandey & Rotinsulu (2015) pada pemerintah kota Bitung juga menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat.

Kinerja keuangan provinsi yang terletak di pulau jawa secara umum lebih baik dibandingkan dengan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dikarenakan realisasi PAD provinsi di Pulau Jawa lebih baik dibandingkan provinsi di Pulau Sumatera, khususnya komponen pendapatan pajak daerah.

Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan tentang perbandingan kinerja keuangan antara provinsi yang terletak di Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2019 yang telah disajikan menunjukkan bahwa kinerja keuangan provinsi yang terletak di Pulau Jawa jauh lebih baik dari pada provinsi di Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah memiliki realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jauh lebih baik dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan provinsi di Pulau Jawa lebih baik ialah kemampuan memperoleh PAD yang sangat baik sehingga membuat tingkat ketergantungan keuangan daerah yang sangat rendah pada pemerintah pusat dan tingkat desentralisasi yang sangat baik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat

memperluas dan memperbanyak sampel penelitian serta menggunakan indikator-indikator lainnya dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006–2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39.
- Banga, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjito, Y., Nugraha, P. S., & Yulianto, Y. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 19–28.
- Kiswanto, K., & Fatmawati, D. (2019). Determinan Kinerja Pemerintah Daerah: Ukuran Pemda, Leverage, Temuan Audit dan Tindak Lanjutnya. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 44–54.
- Lubis, D. P. K., & Nurlia, H. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal KHITABAH*, 1(1).
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mandey, K. R. M., & Rotinsulu, T. O. (2015). Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dikaitkan Dengan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3).

Sayadi / Analisis perbandingan kinerja keuangan provinsi di Pulau Jawa...

- Mokodompit, P. S., Pangemanan, S. S., & Elim, I. (2014). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2).
- Nufus, K., Supratikta, H., & Muchtar, A. (2017). Analysis of Financial Performance of Local Government through South Tangerang Calculation of Realization Regional Budget. *European Journal of Business and Management*, 9(3), 136–146.
- Prastiwi, T., Arfan, M., & Darwanis, D. (2016). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Aceh Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. *Buletin Ekonomi Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 79–84.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Buku Satu Edisi Empat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bnadung: Alfabeta.
- Sulianti, & Ika, S. R. (2012). Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. *Efektif: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 3(2), 123–138.
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43–59.
- Tamboto, L., Morasa, J., & Mawikere, L. (2014). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam masa otonomi daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2).
- Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(6).
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149.